

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BLITAR TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO**
Jl. Imam Bonjol No. 85 Telp. 0342-802978; Fax (0342)
804247
website : <http://dinkopum.blitarkota.go.id>
[email](mailto:dinkop.um@blitarkota.go.id) : dinkop.um@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu perencanaan secara bertahap, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022 ini yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Tahun 2022 memaparkan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar di tahun 2021 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Blitar, Oktober 2021
**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM
KOTA BLITAR**

SAD SASMINTARTI, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660119 198602 2 002

DAFTAR ISI

	Keterangan	No. hal.
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	
	1.2 Landasan Hukum	
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar 2022 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2022, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2022.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementrian Koperasi dan UKM dan Renja Dinas Koperasi dan UKM Prop. Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022. Sedangkan RKA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
- Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD pada Lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah hasil kertas kerja di bagian Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format sebagaimana tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Lampiran 2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD sesuai Lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Sajikan tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota sesuai lampiran 4.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- d. Sajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju sesuai Lampiran 5.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA

Berisikan uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro)
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;

- 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
- 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
- 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
- 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ;
- 8. Program Pengembangan UMKM.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,50		83	80	0	0	83	104,2
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	100	100	100	100	100	100,0
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	dokumen	5	5	5	100	100	100
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5	dokumen	5	5	5	100	100	100
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	100	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	21	pegawai		21	21	100	21	100,0

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2	publikasi	2	2	2	100	100	100
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	2	even	2	2	2	100	100	100
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	150	orang		150	100	100	100	100
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	15	komponen	15	15	15	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	2	macam	2	2	2	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	12	jenis	12	12	12	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	750	dos	750	750	750	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	150	porsi	150	150	150	100	100	100
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	29	macam	29	29	29	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	8	jenis	8	8	7	100	100	100
		Jumlah lembar penggandaan	178.500	lembar	130.635	15.000	7.500	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24	ek	24	24	24	100	100	100
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	17	rakor	17	17	17	100	100	100
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4	rekening	4	4	4	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%		100	0	0	100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	13	unit	13	13	13	100	100	100
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	unit	1	1	0	0	1	100,0
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	6	jenis	6	6	6	100	100	100
	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Persentase Koperasi dengan Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8	%	-	8			8	
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	30	orang	-	30			30	

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Sub Keg. Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT	30 orang	-	30	30	100	30	50
		Jumlah koperasi yg difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah	2 koperasi	-	2	-	-	2	
		Jumlah data dan informasi koperasi yg tersusun	1 dok	-	1	-	-	1	
	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi dengan Peningkatan Volume Usaha Koperasi	30 %		30			30	
	Keg. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7 pelatihan		7			7	
	Sub Keg. Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7 pelatihan		7			7	
		Jumlah dokumen monev pelatihan tahun lalu	1 dok		1			1	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dengan Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2 %		2			2	
	Keg. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2 koperasi		2			2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Keg. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2	koperasi		2			2	
	Sub Keg. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penerima hibah (DEKOPINDA)	1	lembaga		1			1	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	85	%		85			85	
	Keg. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen monev koperasi yang tersusun	1	dokumen		1			1	
		-Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yang tersusun	1	dokumen		1			1	
		-Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi	80	peserta		80			80	
		-Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan	80	peserta		80			80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dibina	80	%		80			80	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7	pelatihan		7			7	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah dokumen monev pelatihan thn lalu (DAK Non Fisik) Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	1 7	dokumen pelatihan		1 7			1 7	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina	80	%		80			80	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30	koperasi		30			30	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pemasaran koperasi Jumlah data monev usaha koperasi yang tersusun Jumlah koperasi yang mendapat bantuan permodalan Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	1 1 10 30	aplikasi dokumen koperasi koperasi		1 1 10 30			1 1 10 30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang aktif	72	%		72			72	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelatihan bagi usaha mikro	3	pelatihan		3			3	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data dan informasi UM yang tersusun	1	dokumen		1			1	
		Jumlah UM yang difasilitasi penyelesaian masalah	5	UM		5			5	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dana bergulir	25	UM		25			25	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen monev pelatihan thn lalu	1	dokumen		1			1	
		Jumlah pelatihan bagi usaha mikro	3	pelatihan		3			3	
		Jumlahpromosi bagi UM	1	promosi		1			1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah dokumen monev pelatihan	1	dokumen		1			1	
		Jumlah pedoman dan standarisasi yang tersusun	1	dokumen		1			1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 s.d Sem I			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana	80	UM		80			80	
		Jumlah UM yang mengikuti pelatihan	80	UM		80			80	
		Jumlah unit usaha yg dilakukan pendampingan pasca pelatihan	2	UM		2			2	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang dibina	35	%		35			35	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	UM		50			50	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah aplikasi UM berbasis IT	1	aplikasi		1			1	
		Jumlah pengunjung yang berminat untuk bekerjasama	5	orang		5			5	
		Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	UM		50			50	

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 Kota Blitar, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Program pelayanan perkantoran

- a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Pengelolaan administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Rapat – Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
3. Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
4. Penyusunan Laporan Keuangan

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

1. Jumlah tagihan rekening listrik bersifat fluktuatif sehingga pencapaian target tidak bisa 100%.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah

Dari 5 kegiatan pada program Pelayanan Perkantoran yang targetnya belum tercapai hanya 1 kegiatan, akan tetapi ketidakberhasilan tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok fungsi. Hal ini terlihat pada tabel 2.1 bahwa indikator kinerja program Pelayanan Perkantoran telah mencapai 100%.

- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program pelayanan perkantoran, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja kegiatan, dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian
2. Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Pada Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah, tidak ada kegiatan yang outputnya tidak tercapai. Dari 2 kegiatan, dua duanya telah sesuai target. Hal ini menunjukkan perencanaan kegiatan pada program ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah akan mendukung tercapainya target indikator Persentase Keikutsertaan Perangkat Daerah dalam Agenda Kota sebesar 100%.
- f. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, tidak ada kegiatan yang outputnya tidak tercapai. Dari 1 kegiatan, telah sesuai target. Hal ini menunjukkan perencanaan kegiatan pada program ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akan mendukung tercapainya target indikator Persentase Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu sebesar 100%.

- f. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 - b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro
 2. Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro
 3. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
 4. Fasilitasi Pengelolaan dana bergulir UM
 - c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 - d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
Semua kegiatan pada program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro akan mendukung tercapainya target indikator Persentase UM dengan peningkatan volume usahal yang Ditindaklanjuti sebesar 1,7%.
 - f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
 1. Mengikut sertakan dalam berbagai pelatihan serta promosi produk unggulan
 2. Melakukan pendampingan pasca pelatihan
 3. Meningkatkan kemampuan UM dalam bidang pemasaran digital
 5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro)
program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 - a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 1. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang usaha mikro
 2. Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat (bidang UM)

- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 - c. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
Semua kegiatan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro) telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target.
 - d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro) akan mendukung tercapainya target indikator Persentase Usaha Mikro yang terbina yang Ditindaklanjuti sebesar 1,5%.
 - e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
 - 1. Meningkatkan kualitas pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan
 - 2. Melakukan monev terhadap pelaku UM yang telah mengikuti pelatihan
6. Program Pembinaan dan pengembangan Koperasi
- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - 2. Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi
 - 3. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi
 - 4. Fasilitasi Pengelolaan dana bergulir Koperasi
 - 5. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 - c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 - d. Faktor – faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan
Semua kegiatan pada Program Pembinaan dan pengembangan Koperasi telah dilaksanakan dan tercapai sesuai target.
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah
Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada program Pembinaan dan pengembangan Koperasi akan mendukung tercapainya target indikator

Persentase Koperasi dengan peningkatan volume usaha koperasi yang Ditindaklanjuti sebesar 82%.

- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
 1. Lebih cermat dalam merencanakan kegiatan
 2. Meningkatkan kegiatan pendampingan ke koperasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

NO	Indikator	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Koperasi Aktif		82%	85%	-	87,41%	%	-	Diukur pada tribulan 4
2.	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri		81%	82%	-	86,7%	%	-	Diukur pada tribulan 4
3.	Persentase Pertumbuhan UM menjadi UK		1,7%	1,72%	-	1,7%	%	-	Diukur pada tribulan 4
4.	Persentase Pertumbuhan WUB menjadi UM		1%	1,5%	-	1%	%		Diukur pada tribulan 4

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator Persentase Koperasi Aktif yang ditindaklanjuti telah sesuai target
2. Indikator Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri sudah mencapai target yang ditetapkan.
3. Persentase Pertumbuhan UM menjadi UK tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya pandemic covid 19 juga penurunan omzet pelaku usaha mikro.
4. Persentase Pertumbuhan WUB menjadi UM mencapai target karena banyak dari masyarakat yang memulai usaha baru akibat dari pemutusan kerja.

Untuk itu Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar akan berupaya untuk :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pendampingan kepada kopersai dan pelaku usaha mikro,
2. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM koperasi dan pelaku usaha mikro melalui pelatihan dan bimbingan teknis maupun pendampingan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Sumberdaya manusia aparatur dan peran Usaha Mikro belum optimal untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro ;
2. Belum adanya data base Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat , sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;
3. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ;
4. Perubahan peraturan Perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah ;
5. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar.

Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk sektor koperasi, Usaha Mikro serta pelaku usaha informal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :1). Penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2). Pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif berbasis digital; 3) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 4). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi; 5). Peningkatan nilai-nilai religius, nasionalis, setara gender, berbudaya, kondusif, dan demokratis; dan 6) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan ketahanan bencana.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
				(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kota Blitar			4.514.025.284		Kota Blitar			4.514.025.284	
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Kecukupan layanan Perkantoran	100%	2.981.020.384	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Kecukupan layanan Perkantoran		2.981.020.384	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu	10	10.039.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu		10.039.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	5	5.769.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun		5.769.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	5	4.269.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun		4.269.900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang diberikan gaji dan tunjangan	21	2.536.917.489	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang diberikan gaji dan tunjangan		2.536.917.489	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan			
Admiistrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Pegawai yang puas terhadap layanan Sekretariat PD	80%	264.367.795	Admiistrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Pegawai yang puas terhadap layanan Sekretariat PD	80%	264.367.795	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	4	41.471.295	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	4	41.471.295	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	29	31.081.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	29	31.081.700	
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	750				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	750		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia	8	23.329.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia	8	23.329.800	
		Jumlah lembar penggandaan	25000				Jumlah lembar penggandaan	25000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25	8.340.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25	8.340.600	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan	2	1.492.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan	2	1.492.800	

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

		gedung kantor yang terpenuhi					gedung kantor yang terpenuhi			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	12	11.303.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	12	11.303.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24	7.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24	7.100.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	17	140.248.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	17	140.248.100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	80%	117.247.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	80%	117.247.900	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	22.641.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	22.641.700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	3	75.259.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	3	75.259.800	
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	10				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	10		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3	19.346.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3	19.346.400	

		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat partisipasi PD dalam agenda Kota	80%	52.447.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat partisipasi PD dalam agenda Kota	80%	52.447.600	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2	52.447.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2	52.447.600	
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	2				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	2		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	34.765.200	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	34.765.200	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT	30	34.765.200	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT	30	34.765.200	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT	30	34.765.200	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT	30	34.765.200	
		Aplikasi koperasi berbasis IT	0				Aplikasi koperasi berbasis IT	0		

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

		Jumlah peserta lomba kompetensi koperasi	30				Jumlah peserta lomba kompetensi koperasi	30		
		Jumlah peserta jambore/galaksi koperasi	14				Jumlah peserta jambore/galaksi koperasi	14		
		Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah	2				Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah	2		
		Jumlah data dan informasi koperasi yang tersusun	1				Jumlah data dan informasi koperasi yang tersusun	1		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	261.629.100	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	261.629.100	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2	261.629.100	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2	261.629.100	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2	11.629.100	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2	11.629.100	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Hibah ke DEKOPINDA	1	250.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Hibah ke DEKOPINDA	1	250.000.000	

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	65.653.200	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	65.653.200	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan	80	65.653.200	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan	80	65.653.200	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan	80	65.653.200	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan	80	65.653.200	
		Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi	80				Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi	80		
		Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yang tersusun	1				Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yang tersusun	1		
		Jumlah dokumen monev koperasi yang tersusun	1				Jumlah dokumen monev koperasi yang tersusun	1		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	491.010.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	491.010.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan		Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7	491.010.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7	491.010.000	

dalam Daerah Kabupaten/Kota										
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7	491.010.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM	7	491.010.000	
		Jumlah dokumen monev pelatihan tahun lalu	1				Jumlah dokumen monev pelatihan tahun lalu	1		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	163.690.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	85%	163.690.600	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30	163.690.600	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30	163.690.600	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30	163.690.600	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30	163.690.600	
		Jumlah koperasi yang mendapat bantuan permodalan	10				Jumlah koperasi yang mendapat bantuan permodalan	10		
		Jumlah data monev usaha koperasi yang tersusun	1				Jumlah data monev usaha koperasi yang tersusun	1		

		Jumlah aplikasi pemasaran koperasi	1				Jumlah aplikasi pemasaran koperasi	1		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah UM dengan peningkatan volume usaha	1,72%	400.270.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah UM dengan peningkatan volume usaha	1,72%	400.270.400	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah pelatihan bagi UM	3	400.270.400	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah pelatihan bagi UM	3	400.270.400	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data dan informasi UM yang tersusun	1	86.412.800	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah data dan informasi UM yang tersusun	1	86.412.800	
		Jumlah UM yang terfasilitasi penyelesaian masalah	5				Jumlah UM yang terfasilitasi penyelesaian masalah	5		
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah UM yang difasilitasi dana bergulir	25	11.994.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah UM yang difasilitasi dana bergulir	25	11.994.000	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelatihan bagi UM	3	216.551.500	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelatihan bagi UM	3	216.551.500	
		Jumlah promosi bagi UM	5				Jumlah promosi bagi UM	5		
		Jumlah dokumen monev pelatihan thn lalu	1				Jumlah dokumen monev pelatihan thn lalu	1		

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah UM yang mengikuti pelatihan	80	85.312.100	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah UM yang mengikuti pelatihan	80	85.312.100	
		Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana	80				Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana	80		
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pasca pelatihan	2				Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pasca pelatihan	2		
		Jumlah dokumen monev pelatihan	1				Jumlah dokumen monev pelatihan	1		
		Jumlah dokumen standarisasi yang tersusun	1				Jumlah dokumen standarisasi yang tersusun	1		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UM yang terbina	2%	115.986.400	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UM yang terbina	2%	115.986.400	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	115.986.400	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	115.986.400	
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	115.986.400	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UM yang mengikuti pameran	50	115.986.400	
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	5				Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	5		

		Jumlah aplikasi UM berbasis IT	1				Jumlah aplikasi UM berbasis IT	1		
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar, tahun 2021

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

Pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok – pokok pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :

- Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal;
- Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, dukungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan (Renstra 2021 - 2026)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target	Realisasi	Target	
		2020		2021	2022
Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian daerah	Prosentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian daerah	NA	NA	2,02	2,05

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 (Renstra 2021 - 2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2020		2021	2022
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Prosentase Koperasi Aktif	20%	20%	21%	22
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	31%	31%	32%	33%
3	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang omzetnya naik	1,7%	1,67%	1,72%	1,8%
4	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1%	1%	1,5%	1,6%

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dimaksud, melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif	Blitar Makmur	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	• Memuat program unggulan inovatif Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-up Community Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang. Program ini bertujuan semakin menumbuhkan industri kreatif dan kampung kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah

			• Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.	Koperasi	Kabupaten/Kota
--	--	--	--	----------	----------------

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022 adalah 8 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.514.025.284			4.514.025.284
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		KOTA BLITAR					
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kecukupan layanan Perkantoran		100%	2.981.020.384		100%	2.981.020.384
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu		10	10.039.600		10	10.039.600
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun		5	5.769.700		5	5.769.700
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun		5	4.269.900		5	4.269.900
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang diberikan gaji dan tunjangan		21	2.536.917.489		21	2.536.917.489
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		21	2.536.917.489		21	2.536.917.489
2.17.01	Admiistrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pegawai yang puas terhadap layanan Sekretariat PD		80%	264.367.795		80%	264.367.795
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		4	41.471.295		4	41.471.295

2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		29	31.081.700		29	31.081.700
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		750			750	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia		8	23.329.800		8	23.329.800
		Jumlah lembar penggandaan		25000			25000	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		25	8.340.600		25	8.340.600
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		2	1.492.800		2	1.492.800
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		12	11.303.500		12	11.303.500
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		24	7.100.000		24	7.100.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		17	140.248.100		17	140.248.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik		80%	117.247.900		80%	117.247.900
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		1	22.641.700		1	22.641.700
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara		3	75.259.800		3	75.259.800
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		10			10	

2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		3	19.346.400		3	19.346.400
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		3			3	
2.17.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi PD dalam agenda Kota		80%	52.447.600		80%	52.447.600
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah		2	52.447.600		2	52.447.600
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		2			2	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi		85%	34.765.200		85%	34.765.200
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT		30	34.765.200		30	34.765.200
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan koperasi berbasis IT		30	34.765.200		30	34.765.200
		Aplikasi koperasi berbasis IT		0			0	
		Jumlah peserta lomba kompetensi koperasi		30			30	
		Jumlah peserta jambore/galaksi koperasi		14			14	

		Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah		2			2	
		Jumlah data dan informasi koperasi yang tersusun		1			1	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi		85%	261.629.100		85%	261.629.100
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir		2	261.629.100		2	261.629.100
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir		2	11.629.100		2	11.629.100
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah ke DEKOPINDA		1	250.000.000		1	250.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi		85%	65.653.200		85%	65.653.200
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan		80	65.653.200		80	65.653.200
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan		80	65.653.200		80	65.653.200
		Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi		80			80	

		Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yang tersusun		1			1	
		Jumlah dokumen monev koperasi yang tersusun		1			1	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi		85%	491.010.000		85%	491.010.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM		7	491.010.000		7	491.010.000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pelatihan bagi koperasi dan UKM		7	491.010.000		7	491.010.000
		Jumlah dokumen monev pelatihan tahun lalu		1			1	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi		85%	163.690.600		85%	163.690.600
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan		30	163.690.600		30	163.690.600
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan		30	163.690.600		30	163.690.600
		Jumlah koperasi yang mendapat bantuan permodalan		10			10	
		Jumlah data monev usaha koperasi yang tersusun		1			1	

		Jumlah aplikasi pemasaran koperasi		1			1	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UM dengan peningkatan volume usaha		1,72%	400.270.400		1,72%	400.270.400
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelatihan bagi UM		3	400.270.400		3	400.270.400
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data dan informasi UM yang tersusun		1	86.412.800		1	86.412.800
		Jumlah UM yang terfasilitasi penyelesaian masalah		5			5	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi dana bergulir		25	11.994.000		25	11.994.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelatihan bagi UM		3	216.551.500		3	216.551.500
		Jumlah promosi bagi UM		5			5	
		Jumlah dokumen moneyv pelatihan thn lalu		1			1	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan		80	85.312.100		80	85.312.100
		Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana		80			80	
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pasca pelatihan		2			2	
		Jumlah dokumen moneyv pelatihan		1			1	

		Jumlah dokumen standarisasi yang tersusun		1			1	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UM yang terbina		2%	115.986.400		2%	115.986.400
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UM yang mengikuti pameran		50	115.986.400		50	115.986.400
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang mengikuti pameran		50	115.986.400		50	115.986.400
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama		5			5	
		Jumlah aplikasi UM berbasis IT		1			1	

Sumber : Dinkop & UM Kota Blitar Tahun 2021

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.

2.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

2.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

2.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pembinaan yang semakin kompleks, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas pembinaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembinaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur koperasi dan usaha mikro dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur koperasi dan usaha mikro
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, Oktober 2021

Plt. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660119 198602 2 002